

MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM BERORIENTASI KESALEHAN SOSIAL

Mahmudah Mulia Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Udha009@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the Islamic economic system oriented to social piety. The results of the analysis show that the Islamic economic system prioritizes legal and ethical aspects, namely in the form of having to implement several legal principles and Islamic business ethics. Social piety manifested in mosque-based and non-mosque-based activities shows that spirituality is an important commodity in shaping social piety.

Keywords: Social Piety, Islamic Economic System

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem ekonomi Islam berorientasi kesalehan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Kesalehan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan berbasis masjid maupun non masjid menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan komoditas penting dalam membentuk kesalehan sosial.

Kata Kunci : Kesalehan Sosial, Sistem Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha membangun dan meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengantisipasi kompetisi bebas di era globalisasi. Usaha semacam itu terutama dilandasi oleh kesadaran bahwa dengan adanya sumber daya yang handal akan menghindarkan diri dari ketergantungan ekonomi dan menciptakan masyarakat mandiri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya tersebut dengan cara pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, baik di tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, mulai dari yang sifatnya individu hingga pemberdayaan secara kolektif.¹

Apabila diamati dalam kajian maupun kebijakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang sejak era 1950-an sampai saat ini, perspektif pembangunan yang menjadi arus utama adalah perspektif pembangunan yang berbasis pada masyarakat.² Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai *khalifah* dan beribadah kepada Allah.³

Ekonomi Islam merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian masyarakat. Banyak Negara yang ada didunia ini melakukan pendekatan ekonomi konvensional dalam memenuhi kepentingan pribadi pendekatan ini umumnya lebih berkembang di dunia barat. Di balik keberhasilan tersebut, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi.⁴

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵ Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi

¹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, Utama Press 2010).

²Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 5

³Hanifullah, "Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah", *Episteme*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2012), h. 269.

⁴M. Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspective* (Jakarta: SEBI, 2001), h. 45.

⁵Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj. Potan Arif Harahap (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), h. 19.

sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶

Meskipun ada perbedaan pemikiran tentang ekonomi Islam, namun pada dasarnya perbedaan tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan dalam prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip tersebut membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam dan jika diibaratkan, yaitu sebagai sebuah bangunan yang didasarkan pada lima pilar. Dengan kata lain, bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil).⁷ Kelima nilai universal inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Ekonomi Islam berbasis pada paradigma di mana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.⁸

Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami, serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki postulat iman, juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan Penciptanya. Dan interaksi horizontal antarsesama manusia, serta postulat akhlak yang menjadi *built in control* dalam diri seorang Muslim. Agama mempunyai tiga pondasi pokok yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Dalam konteks kekinian Iman sering disebut dengan teologi, ilmu kalam, aqidah, atau tauhid. Adapun Islam, sering diekuivalenkan dengan syari'at atau fiqih. Sedangkan Ihsan terkadang diistilahkan dengan tasawuf atau akhlak.

Permasalahan sosial ekonomi biasanya terjadi akibat dari kebijakan yang diterapkan secara sentralistik atau terpusat. Orientasi pembangunan hanya

⁶Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Cet. I (Jakarta: III Indonesia, 2002), h. 52-65.

⁸Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid", *Jurnal MALIA*, Volume 7, Nomor 2, (Juni 2016).

menekankan pertumbuhan ekonomi makro, kebijakan yang terpusat dan bersifat top down, memposisikan masyarakat sebagai obyek.⁹ Pada kondisi seperti ini, masyarakat tergiring untuk kurang menyadari masalah sosial yang ada dalam lingkungan mereka. Mereka juga kurang mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk menangani masalah sosial ekonomi dari dan oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini, masyarakat berada dalam situasi kerentanan struktural (*Structural Vulnerability*),¹⁰ di mana tingkat kemiskinan yang tinggi disertai ketidak setaraan. Ketidakmampuan dalam mengakses terhadap pelayanan dasar hidup seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain-lain. Hal ini tentunya membuat masyarakat tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasikan potensi mereka dalam menangani permasalahan sosial-ekonomi yang ada dalam kehidupan.¹¹

Kesalehan sosial adalah semua jenis kebajikan yang ditunjukkan kepada semua manusia, misalnya bekerja untuk memperoleh nafkah bagi anak istri dan keluarga. Menurut Ali Anwar Yusuf mengartikan kesalehan sosial secara normatif, kesalehan sosial merupakan deviasi (turunan) dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, khususnya dari sisi *hablun min an-naas*.¹² Ilyas Abu Haidar¹³ kesalehan sosial adalah kumpulan dasar akhlak-akhlak dan kaidah-kaidah sosial tentang hubungan antara masyarakat serta semua perkara tentang urusan umat beragama dijaga dan diperhatikan oleh penegak hukum sehingga terciptalah suatu kerukunan umat beragama.

Salah satu kelebihan Islam dibandingkan dengan agama dan aliran kepercayaan yang lain ialah bahwa Islam merupakan agama sosial. Islam tidak sekedar menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban individual akan tetapi islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sosial

⁹Sugeng Budiharsono, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional* (Jakarta: TKP3KPK, Menko Kesra, 2004).

¹⁰Sadji Partoatmodjo, *Masalah Kemiskinan dan kompleksitas Penanggulangannya* (Jakarta TKP3KPK Menko Kesra, 2004).

¹¹Harry Hikmat, “Pembangunan Sosial yang Berpusatkan pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis”. *Makalah* (Bandung: Unpad, 1999).

¹²Yusuf, Mundzirin, dkk, *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2007), h. 105.

¹³Ilyas Abu Haidar, *Etika Islam dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 18.

baik terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup yang lain.¹⁴ Kesalehan merupakan pondasi dasar yang harus dicapai oleh setiap individu dan setiap masyarakat (sosial). Dalam kehidupan berindividu kita harus mempunyai banyak amal ibadah yang baik, untuk mencapai tingkat kesalehan, sebab kesalehan itu merupakan pokok cerminan diri manusia yang baik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba mengkaji implementasi sistem ekonomi Islam berorientasi kesalehan sosial. Dalam hal ini tulisan ini lebih fokus pada penerapan sistem ekonomi Islam dengan kesalehan itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Kesalehan Sosial Sebagai Identitas

Perbincangan mengenai kesalehan sosial sebagai sebuah identitas pada dasarnya merupakan bentuk pembiasaan diri/kolektif untuk menerapkan nilai, norma, dan perilaku agamis dalam kehidupan sehari-hari. Kontestasi tersebut pada dasarnya untuk membentuk sikap dikotomis “kita” dan “mereka”, yakni proses identifikasi seberapa saleh untuk menjalankan perintah agama. Namun tidak disangka kemudian, dikotomis tersebut secara perlahan menggeser perilaku beribadah yang pada awalnya untuk membentuk spiritualisme, justru mengarah pada materialisme.¹⁵

Studi Riesebrodt¹⁶ menunjukkan ada empat macam ritual kesalehan sosial tersebut dalam empat bentuk. 1) seberapa intens ibadah wajib maupun sunnah itu dilakukan, meskipun dalam taraf ini, ibadah sunnah yang berkembang menjadi identitas. 2) seberapa patuh, mereka menjalankan perintah berdasarkan pada Qur'an dan Hadist. 3) selebrasi terhadap perayaan keagamaan, 4) interaksi nilai-nilai sosial ekonomi dengan nilai religiusitas. Keempat indikator itu menjadi penting melihat dimensi materi sangatlah membentuk sikap menjadi saleh bagi publik dalam situasi kekinian.

Adapun dari empat indikator tersebut, sebenarnya ritual identitas tersebut sebenarnya dapat dikategorisasikan menjadi dua arus besar yakni kebutuhan akan

¹⁴Ilyas Abu Haidar, *Etika Islam dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial*, h. 23.

¹⁵Idi Ibrahim, “Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama” *Mediator* Vol. 3, No. 1. (2002).

¹⁶Martin Riesebrodt, *Pious Passion* (Berkeley: University of California Press, 1993), h. 156.

spiritual dan juga kebutuhan akan eksistensial. Pertama, kebutuhan akan spiritual tersebut dilihat dari seberapa orang menjalankan ibadah sosial di masjid, seberapa intens menjalankan ibadah haji dan umrah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang kemudian ditunjukkan dengan adanya gelar haji sebagai simbol prestisius bagi orang yang pernah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Konstruksi sosial bagi muslim Indonesia adalah haji dan tuan guru adalah gelar terhormat dan dianggap sanggup untuk bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat muslim lainnya. Selain itu pula, dengan mengikuti kegiatan ta'lim, maka konstruksi saleh akan disematkan oleh orang lain terhadap orang yang mengikuti pengajian. Dengan demikian, kebutuhan akan spiritual sendiri melihat bahwa spiritual dibentuk karena kesadaran diri sendiri, dan kebutuhan akan diakui oleh orang lainnya.¹⁷

B. Konsep dalam Membangun Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam, meskipun ada kemiripan dengan sistem ekonomi yang lainnya, namun sesungguhnya sangat jauh berbeda dalam substansinya. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam tersebut adalah sebagai berikut: pertama, pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah Allah swt. Berbagai jenis sumber daya merupakan pemberian dan titipan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam berproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama. Kedua, Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakili oleh negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketiga, Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pandangan Islam terhadap harta, adalah sebagai perhiasan yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik asalkan tidak berlebihan karena akan menimbulkan keangkuhan dan kebanggaan diri dan harta sebagai bekal ibadah. Kelima, pemilikan harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Keenam, satu hal lagi yang terpenting bahwa semua harta (sumber daya) yang diamanatkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Konsep ini memiliki implikasi yang sangat penting sehubungan dengan kepemilikan aset dan alat produksi. Berdasarkan keyakinan inilah, setiap aktivitas ekonomi seorang Muslim harus

¹⁷Wasisto Raharjo Jati, "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim", *IBDA' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 13, No. 2, (Juli - Desember 2015).

digerakkan oleh motivasi impersonal sebagai refleksi tanggung jawab sebagai orang beriman.¹⁸

Oleh karena itu, dalam rangka membangun metodologi ilmu ekonomi Islam maka perlu dilakukan kritik epistemologis ilmu ekonomi konvensional untuk mendapatkan landasan epistemologis ilmu ekonomi Islam yang kokoh. Sebagai kerangka dasar pembangunan metodologi ilmu ekonomi Islam dapat digunakan tiga kerangka metodologi yang ditawarkan Mohammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan penerapan konsep *shuratic process* (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, sangat dimungkinkan metodologi ekonomi Islam dapat dibangun dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Karena utilitas yang optimal akan lahir manakala adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu, semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang ihsan kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari ekonomi Islam, agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

C. Membangun Ekonomi Islam berorientasi Kesalehan Sosial

Umar Chapra menjelaskan, bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip Tauhid serta etika mengacu pada tujuan syariah atau *maqashid al-syariah*. Yaitu memelihara: (1) Iman atau *faith*, (2) hidup atau *life* (3) nalar atau *intellect* (4) keturunan atau *posterity* dan (4) kekayaan atau *wealth*.

Basis utama sistem ekonomi syariah, adalah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan hukum Islam atau syariah. Terutama pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan: (1) keadilan (2) pemerataan dan (3) keseimbangan.

Sementara dalam faham Islam, asas kolektivitas yang sama rata serta sama rasa, adalah melanggar *sunnatullah*. Karena pada dasarnya manusia memang berbeda satu dengan lainnya, agar dapat saling belajar satu dengan lainnya. Sistem ekonomi Islam menganut Asas *Equilibrium*, yaitu dengan “menjembatani” antara sikaya dan simiskin. Atau kelompok masyarakat *borjuis* dengan masyarakat *proletar* melalui konsep ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) serta Waqaf. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya

¹⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 13-16.

keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami.

Adanya pola institusionalisasi terhadap pola kesalehan sosial pada dasarnya bertujuan untuk menempatkan Islam sebagai nilai umum yang dominan (*put Islam at the centre of the public domain*). Hal itu merupakan bentuk kelanjutan dari adanya wacana Islam publik yang dikembangkan kelompok Islamis pasca Orde Baru. Artinya dengan menerapkan nilai-nilai Islam tersebut, maka masyarakat akan menjadi saleh dengan sendirinya baik itu Islam maupun non Islam. Pola institusionalisasi tersebut merupakan bagian dari cara Islamisasi secara kultural dengan coba membentuk nilai-nilai Islam sebagai bentuk *taken for granted*. Oleh karena itulah, formalisasi syariah kemudian menjadi jalan penting dalam membentuk kesalehan sosial tersebut secara regulatif dan asetif. Dikatakan demikian, dikarenakan perlunya adanya pengawalan dari negara dan ulama untuk mengatur dan menjaga umat Islam agar sesuai dengan dengan kaidah agama. Implikasinya adalah munculnya berbagai macam produk legal mulai dari Kitab Hukum Islam (KHI), ekonomi Islam, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mencerminkan adanya sinergi antara dimensi ukhrawi dan duniawi sehingga kesalehan sosial dibentuk berdasarkan proses taklid terhadap ajaran agama dalam kehidupan. Adapun dari segi intimitas, ritual kesalehan sosial bagi kelompok kelas menengah muslim sendiri dibentuk berdasarkan prinsip *al-maslahah al-ammah* (kebajikan untuk umat).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa terjadi institusionalisasi kesalehan sosial. Maka zakat sebagai salah satu ritualnya menjadi penting dibicarakan lebih lanjut. Studi Saidur Rahman menjadi penting untuk membaca kontestasi dalam kesalehan sosial berbasis zakat tersebut. Zakat sendiri telah diatur formalisasinya melalui UU 38 / 1999 tentang terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) yang diatur negara dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola komunitas. Namun demikian, paska penerapan UU 23 / 2011 sebagai revisi atas UU 38/1999 dengan munculnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah menimbulkan polemik baru terhadap pengaturan zakat dimana pengumpulan dana oleh LAZ harus seizin dan disetorkan kepada BAZNAS selaku otoritas pengumpul zakat nasional.

PENUTUP

Membudayanya berbagai macam ritual kesalehan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan berbasis masjid maupun non masjid menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan komoditas penting dalam membentuk kesalehan sosial. Hal itulah yang mendorong banyak munculnya berbagai macam produk religius

untuk mengkonstruksi berbagai macam identitas kesalehan sosial tersebut. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: Tauhid (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil).

Sistem ekonomi Islam menganut Asas *Equilibrium*, yaitu dengan “menjembatani” antara sikaya dan simiskin. Atau kelompok masyarakat *borjuis* dengan masyarakat *proletar* melalui konsep ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) serta Waqaf. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, Sugeng. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. Jakarta: TKP3KPK, Menko Kesra, 2004.
- Chapra, M. Umar. *The Future of Economics; an Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI, 2001.
- Haidar, Ilyas Abu. *Etika Islam dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial*. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Hanifullah. "Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah". *Episteme*. Vol. 7, No. 2, (Desember 2012).
- Hikmat, Harry. "Pembangunan Sosial yang Berpusatkan pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis". *Makalah*. Bandung: Unpad, 1999.
- _____. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, Utama Press 2010.
- Ibrahim, Idi. "Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama". *Mediator*. Vol. 3, No. 1. (2002).
- Jati, Wasisto Raharjo. "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim". *IBDA' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 13, No. 2, (Juli - Desember 2015).
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Cet. I. Jakarta: III Indonesia, 2002.
- Maghfur, Ifdlolul. "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid". *Jurnal MALIA*. Volume 7, Nomor 2, (Juni 2016).
- Manan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Mundzirin, Yusuf, dkk. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Partoatmodjo, Sadji. *Masalah Kemiskinan dan kompleksitas Penanggulangannya*. Jakarta TKP3KPK Menko Kesra, 2004.
- Riesebrodt, Martin. *Pious Passion*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2003.